

Katalog: 9302023.3210

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN MAJALENGKA MENURUT PENGELUARAN

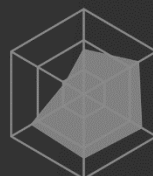
2013-2017



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAJALENGKA**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN MAJALENGKA
MENURUT PENGELUARAN**

2013-2017



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN MAJALENGA MENURUT PENGELUARAN 2013-2017

ISSN:

Nomor Publikasi: 32100.1803

Katalog: 9302023.3210

Ukuran Buku: 17,6 x 25 cm

Jumlah halaman: xiv + 82 halaman

Naskah:

BPS Kabupaten Majalengka

Penyunting:

BPS Kabupaten Majalengka

Desain Kover oleh:

Subdirektorat Konsolidasi Neraca Produksi Regional

Ilustrasi Kover:

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Foto diambil dari Koleksi Foto Endang Mu'min

Penerbit:

©BPS Kabupaten Majalengka

Pencetak:

CV. Setya Mandiri Jaya

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Tim Penyusun

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN MAJALENGKA
MENURUT PENGELUARAN 2013-2017**

Penanggung Jawab Umum : Aris Budiyanto, S.ST., M.Si.

Penanggung Jawab Teknis : Fenty Jimika, S.ST.

Penulis dan Pengolahan Data : Fenty Jimika, S.ST.
Yesi Desiawati Sirman, S.ST.

Editor : Aep Saepudin, S.Si.

Desain/Lay out : Aep Saepudin, S.Si.
Yesi Desiawati Sirman, S.ST.

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun Kabupaten Majalengka). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Majalengka, Agustus 2018

**Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Majalengka,**



Aris Budiyanto

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB	7
BAB II. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	13
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)	15
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT)	17
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)	20
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	23
2.5 Perubahan Inventori (PI)	26
2.6 Ekspor Impor	29
BAB III. TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN MAJALENGKA MENURUT PDRB PENGELUARAN TAHUN 2013-2017	33
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran	35
3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran	43
3.2.1 Konsumsi Akhir Rumahtangga	43
3.2.2 Konsumsi Akhir LNPRT	47
3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah	48
3.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	51
3.2.5 Perubahan Inventori	52
3.2.6 Net Ekspor Barang dan Jasa	54

	Halaman
BAB IV. PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN, KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2013-2017	57
4.1 PDRB (Nominal)	59
4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB	60
4.3 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	61
BAB V. PENUTUP	65
LAMPIRAN	69
DAFTAR PUSTAKA	81

<https://majalengkakab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017	36
Tabel 2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017	37
Tabel 3.	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Majalengka Tahun 2013—2017	39
Tabel 4.	Pertumbuhan PDRB ADHK 2011 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Majalengka Tahun 2013—2017	41
Tabel 5.	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Majalengka Tahun 2013 – 2017	42
Tabel 6.	Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Majalengka, Tahun 2013—2017	42
Tabel 7.	Perkembangan Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Majalengka, Tahun 2013—2017	44
Tabel 8.	Struktur Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Majalengka, Tahun 2013—2017	46
Tabel 9.	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Majalengka, Tahun 2013—2017	47
Tabel 10.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Majalengka, Tahun 2013—2017	48
Tabel 11.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Majalengka, Tahun 2013 – 2017	49
Tabel 12.	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Majalengka, Tahun 2013 – 2017	52

Tabel 13.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Majalengka, Tahun 2013—2017	53
Tabel 14.	Perkembangan Net Ekspor Kabupaten Majalengka, Tahun 2013 – 2017	55
Tabel 15.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Majalengka, Tahun 2013—2017	60
Tabel 16.	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Majalengka, Tahun 2013—2017	61
Tabel 17.	Incremental Capital Output Ratio, Kabupaten Majalengka, Tahun 2013 –2017	62

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Majalengka 2013 – 2017	36
Grafik 2.	PDRB atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Majalengka 2013 – 2017	38
Grafik 3.	Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Majalengka	38
Grafik 4.	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Majalengka, Tahun 2013 – 2017	40
Grafik 5.	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Majalengka 2013 – 2017	41

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Tabel 1.	PDRB Kabupaten Majalengka Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran 2013 – 2017 (juta rupiah)	71
Tabel 2.	PDRB Kabupaten Majalengka Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran 2013 – 2017 (juta rupiah)	72
Tabel 3.	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Majalengka Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran 2013 – 2017 (persen)	73
Tabel 4.	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Majalengka Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (persen), 2013 – 2017	74
Tabel 5.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Majalengka Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran 2013 – 2017 (persen)	75
Tabel 6.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Majalengka Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran 2013 – 2017 (persen)	76
Tabel 7.	Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Majalengka Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2013 – 2017	77
Tabel 8.	Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Majalengka Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran 2013 – 2017	78
Tabel 9.	Indeks Implisit PDRB Kabupaten Majalengka Menurut Pengeluaran (2010=100), Tahun 2013 – 2017	79
Tabel 10.	Laju Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Kabupaten Majalengka Menurut Pengeluaran (2010=100), Tahun 2013 – 2017 (persen)	80

<https://majalengkakab.bpt.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik

3. - Yang dimaksud adalah rumahtangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik

- Disebut sebagai pendekatan “riil”

- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>) Tetap Bruto	= Pembentukan Modal
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten Majalengka menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;

- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
 - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
 - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.

- f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). *FISIM* dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- **Klasifikasi**

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<https://majalengkakab.bps.go.id>

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat

harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain

- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumahtangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang

tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah Kabupaten Majalengka mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P Kabupaten Majalengka mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka; b). PK-P Kabupaten Majalengka yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P Kabupaten Majalengka.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P Kabupaten Majalengka tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P Kabupaten Majalengka Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

$$\text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = \text{Output} - \text{Penjualan barang dan jasa} + \text{Social transfer in kind purchased market production} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya

hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS

- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v **Metoda estimasi**

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate*

PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total
Supply Barang \times Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi : PMTB atas dasar harga Konstan (t) =
PMTB atas dasar harga (t-1) \times Indeks Produksi (t)

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi).

Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam

- bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
 - e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
 - f. Ternak untuk tujuan dipotong;
 - g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
 - h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

v **Metoda Estimasi**

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. **Metoda Revaluasi**

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume nventori (t) - Volume inventori (t-1)) × Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. **Metoda Deflasi**

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t) - Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan × IHPB rata-rata (t)

2.6 EKSPOR - IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang

tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhannya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah Kabupaten Majalengka terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/Kabupaten Majalengka
- b. Impor dari luar provinsi/Kabupaten Majalengka.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah Kabupaten Majalengka didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor Kabupaten Majalengka diperlakukan

sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.

<https://majalengkakab.bps.go.id>

BAB III

**TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN MAJALENGKA
MENURUT PDRB PENGELUARAN TAHUN 2013 -2017**

<https://majalengkakab.bps.go.id>

3.1. PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2100 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Kabupaten Majalengka atas dasar harga Berlaku di tahun 2017 meningkat sebesar 6,81 %, yakni dari 23.206,83 miliar Rupiah pada tahun 2016 menjadi 25.419,28 miliar Rupiah pada tahun 2017.

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Majalengka selama periode 2013-2017 yakni sebesar 4,93%; 4,91%; 5,33%; 6,03% dan 6,81%. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori konstruksi dan industri pengolahan yang tumbuh di atas 13%. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB.

Pada periode tahun 2013 - 2017, PDRB Kabupaten Majalengka atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 17.543,19 miliar Rupiah (2013); 19.193,46 miliar Rupiah (2014); 21.292,62 miliar Rupiah (2015); 23.206,83 miliar Rupiah (2016) dan 25.419,28 miliar Rupiah (2017). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari

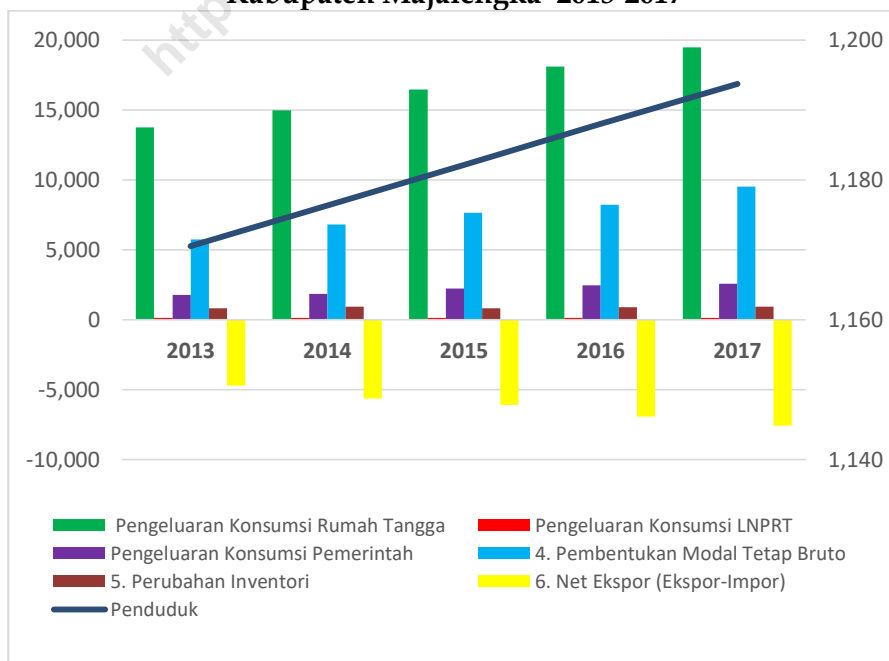
sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Majalengka pada periode 2013-2017 dapat dilihat dari tabel 1 dan grafik 1 berikut ini:

Tabel 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Majalengka 2013-2017

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	13.760,91	14.979,93	16.474,44	18.110,12	19.461,11
2. Konsumsi LNPRT	123,78	140,43	134,64	140,90	153,26
3. Konsumsi Pemerintah	1.765,58	1.870,15	2.232,63	2.473,72	2.590,44
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.757,96	6.820,20	7.656,20	8.241,45	9.508,09
5. Perubahan Inventori	841,52	927,96	822,35	891,01	946,11
6. Net Ekspor (Ekspor-Impor)	-4.706,56	-5.545,21	-6.027,65	-6.650,37	-7.239,72
PDRB	17.543,19	19.193,46	21.292,62	23.206,83	25.419,28

Grafik 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Majalengka 2013-2017



Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Majalengka pada periode 2013-2017 dapat dilihat dari tabel 2 dan grafik 2 berikut ini:

Tabel 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Majalengka 2013-2017

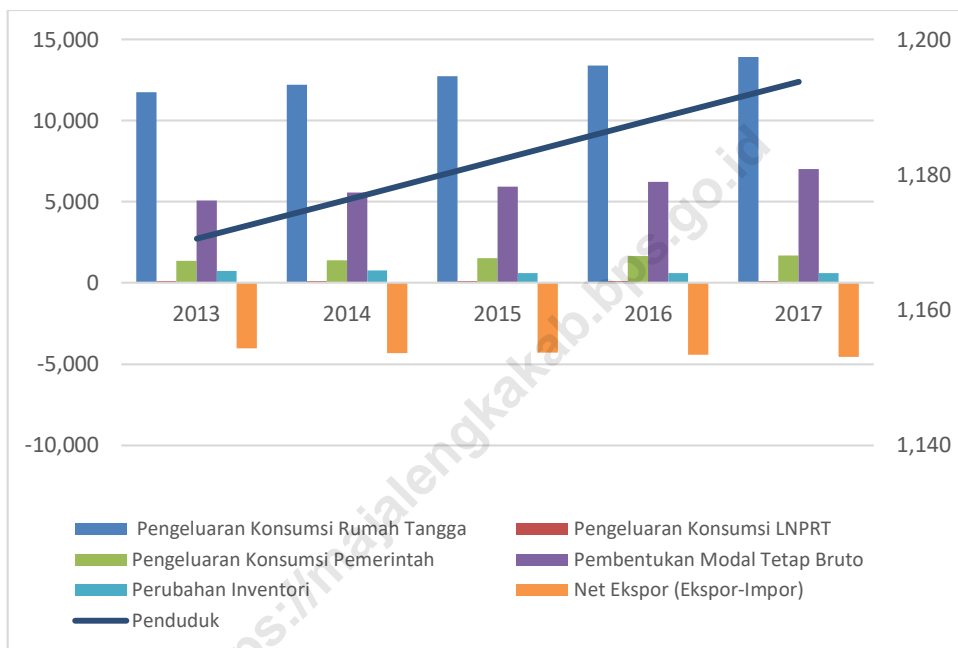
(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	11.742,66	12.197,70	12.722,84	13.391,21	13.910,92
2. Konsumsi LNPRT	110,08	116,41	109,24	113,71	118,40
3. Konsumsi Pemerintah	1.369,87	1.399,56	1.530,50	1.652,12	1.689,44
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.080,25	5.582,84	5.916,88	6.237,37	7.017,20
5. Perubahan Inventori	747,99	767,06	602,60	609,41	592,33
6. Net Ekspor (Ekspor-Impor)	-4.037,96	-4.312,92	-4.291,14	-4.412,02	-4.538,80
PDRB	15.012,89	15.750,66	16.590,93	17.591,79	18.789,49

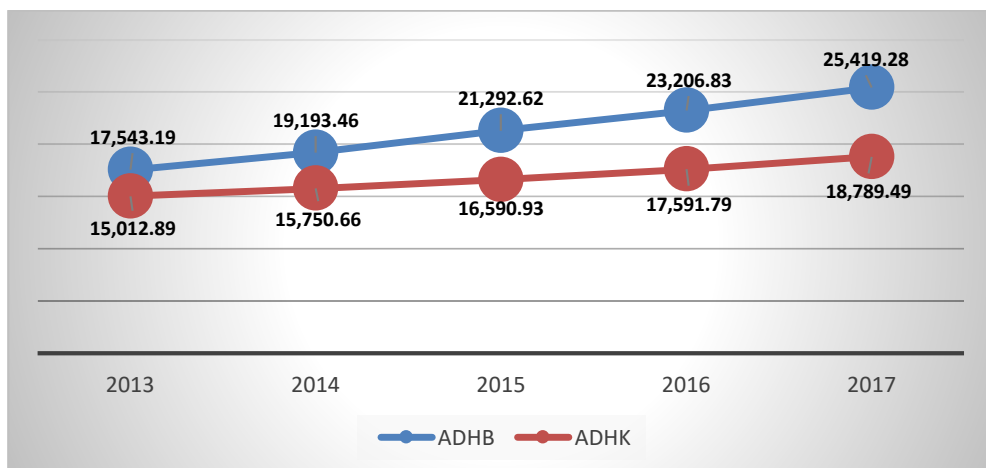
Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Majalengka meningkat, yakni sebesar 15.012,89 miliar Rupiah (2013); 15.750,66 miliar Rupiah (2014); 16.590,93 miliar Rupiah (2015); 17.591,79 miliar Rupiah (2016); dan 18.789,49 miliar Rupiah (2017). Sedangkan dari grafik 2, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Majalengka cenderung meningkat, yakni dari 4,93 persen pada tahun 2013 menjadi 6,81 persen pada tahun 2017.

Grafik 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017



Grafik 3. Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017



Dari grafik 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

Tabel 3. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

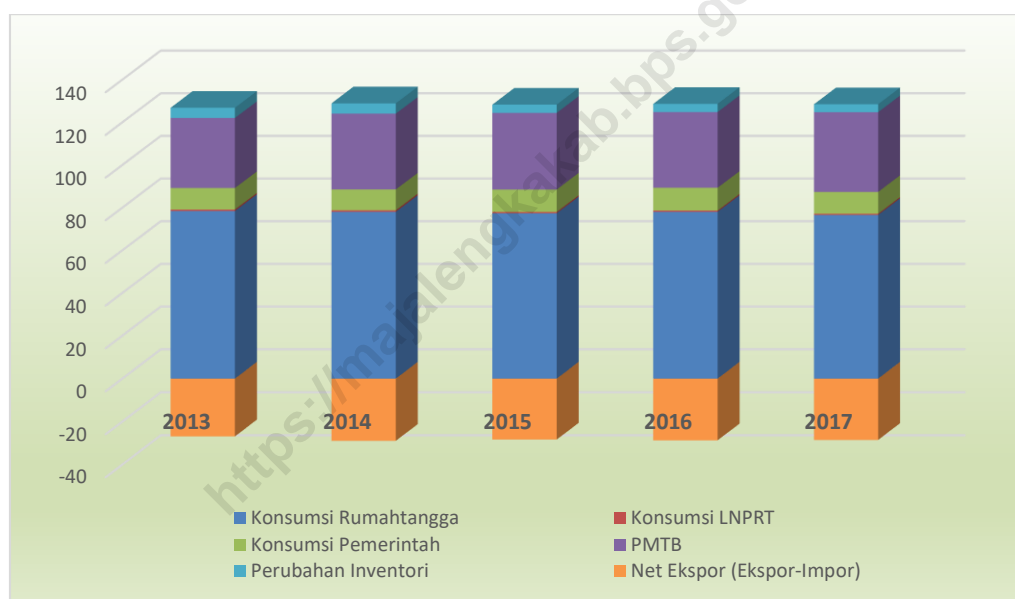
Komponen Pengeluaran	(%)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	78,44	78,05	77,37	78,04	76,56
2. Konsumsi LNPRT	0,71	0,73	0,63	0,61	0,60
3. Konsumsi Pemerintah	10,06	9,74	10,49	10,66	10,19
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,82	35,53	35,96	35,51	37,41
5. Perubahan Inventori	4,80	4,83	3,86	3,84	3,72
6. Net Ekspor (Ekspor-Impor)	-26,83	-28,89	-28,31	-28,66	-28,48
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2013-2017, PDRB Kabupaten Majalengka, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT). Pengeluaran untuk akitvitas

pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 32 s.d 37 persen. Disisi lain komponen net ekspor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar, yakni sekitar 26 s.d 28 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Grafik 4. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017



Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 9,74 - 10,66 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB Kabupaten Majalengka berada pada urutan keempat.

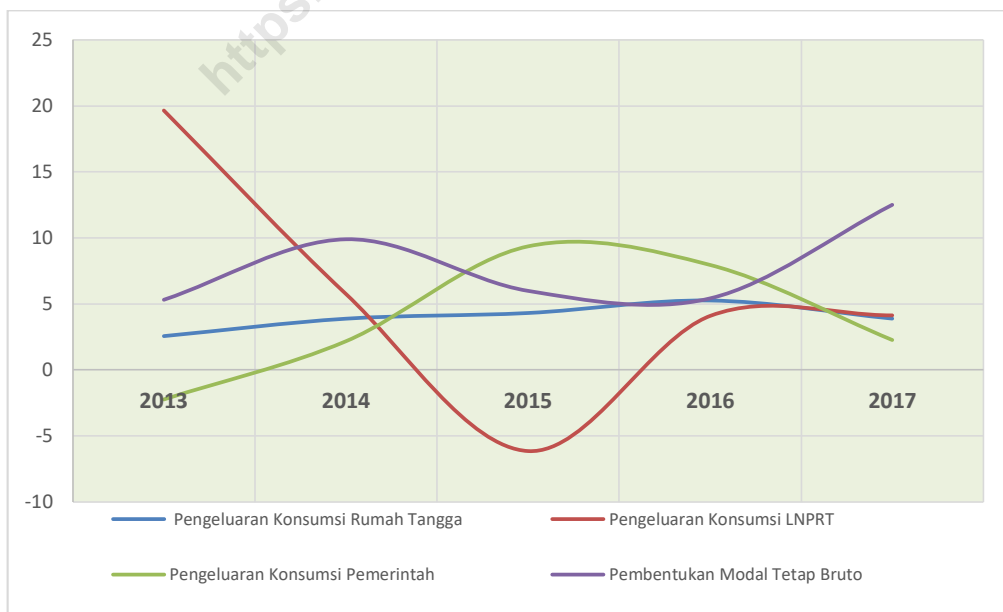
Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2013 - 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka mengalami pertumbuhan, yakni sebesar 4,93 persen (2013); 4,91 persen (2014); 5,33 persen (2015); 6,03

persen (2016); dan 6,81 persen (2017). Sedangkan dari grafik 5 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

(%)					
Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2,55	3,88	4,31	5,25	3,88
2. Konsumsi LNPRT	19,65	5,75	-6,16	4,09	4,13
3. Konsumsi Pemerintah	-2,24	2,17	9,36	7,95	2,26
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,31	9,89	5,98	5,42	12,50
5. Perubahan Inventori					
6. Net Ekspor (Ekspor-Impor)					
PDRB	4,93	4,91	5,33	6,03	6,81

Grafik 5. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Majalengka 2013-2017



**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017**

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	117,19	122,81	129,49	135,24	139,90
2. Konsumsi LNPRT	112,44	120,64	123,25	123,92	129,44
3. Konsumsi Pemerintah	128,89	133,62	145,88	149,73	153,33
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	113,34	122,16	129,40	132,13	135,50
5. Perubahan Inventori					
6. Net Ekspor (Ekspor-Impor)					
PDRB	116,85	121,86	128,34	131,92	135,28

Indeks implisit⁶ PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2013-2017, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

**Tabel 6. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017**

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2,04	3,03	3,33	4,03	2,95
2. Konsumsi LNPRT	0,13	0,04	-0,05	0,03	0,03
3. Konsumsi Pemerintah	-0,22	0,20	0,83	0,73	0,21
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,79	3,35	2,12	1,93	4,43
5. Perubahan Inventori					
6. Net Ekspor (Ekspor-Impor)					
PDRB	4,93	4,91	5,33	6,03	6,81

⁶ Indeks perkembangan

3.1 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumahtangga, LNPRRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Majalengka untuk periode 2013 - 2017.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Majalengka, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Majalengka maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumahtangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumahtangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok

COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2013 - 2017 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 7. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RumahTangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	13.760,91	14.979,93	16.474,44	18.110,12	19.461,11
a. ADHK 2010 (Miliar Rp)	11.742,66	12.197,70	12.722,84	13.391,21	13.910,92
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	78,44	78,05	77,37	78,04	76,56
Rata-rata konsumsi per Kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	11.756,39	12.734,64	13.936,48	15.244,16	16.302,84
b. ADHK 2010	10.032,13	10.369,43	10.762,83	11.272,02	11.653,37
Pertumbuhan ⁷					
a. Total konsumsi RT	2,55	3,88	4,31	5,25	3,88
b. Per-kapita	2,05	3,36	3,79	4,73	3,38
Jumlah penduduk (000 orang)	1.171	1.176	1.182	1.188	1.194

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

Selama periode 2013–2017 proporsi pengeluaran konsumsi rumahtangga terhadap total PDRB cenderung menurun, yaitu 78,44 persen (2013); 78,05 persen (2014); 77,37 persen (2015); 78,04 persen (2016) dan 76,56 persen (2017). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 78,44 persen dan terendah pada tahun 2017 sebesar 76,56 persen. Walaupun secara nominal nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan, namun peranannya terhadap total PDRB cenderung menurun, hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan nilai nominal di komponen lain bergerak lebih tinggi daripada komponen konsumsi rumah tangga, sehingga terjadi sedikit pergeseran distribusi (proporsi).

Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumahtangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumahtangga.

Secara rata-rata, konsumsi perkapita dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2013, setiap rumah tangga di Kabupaten Majalengka menghabiskan dana sekitar 11,76 juta Rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 12,73 juta Rupiah (2014); 13,94 juta Rupiah (2015); 15,24 juta Rupiah (2016); dan 16,30 juta Rupiah (2017).

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung naik, searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara

nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” meningkat pada kisaran 2,05 s.d 4,73 persen. Peningkatan tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumahtangga, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Struktur Komponen Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

(%)					
Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	46,82	48,24	48,64	50,06	50,30
b. Pakaian dan Alas Kaki	5,16	4,95	5,01	4,94	4,91
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	10,55	10,16	10,63	10,31	10,35
d. Kesehatan dan Pendidikan	7,05	7,02	6,80	6,58	6,54
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	20,73	20,11	19,43	18,97	18,83
f. Hotel dan Restoran	4,16	4,04	3,83	3,79	3,77
g. Lainnya	5,53	5,48	5,65	5,35	5,30
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Pada tahun 2013 pertumbuhan komponen konsumsi rumahtangga sebesar 2,55 persen. Kemudian, berturut-turut sebesar 3,88 persen (2014); 4,31 persen (2015); 5,25 persen (2016) dan 3,88 persen (2017). Sementara itu pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita pada masing-masing tahun adalah 4,40 persen (2013); 4,82 persen (2014); 5,51 persen (2015); 6,30 persen (2016); dan 4,40 persen (2017). Dari data tersebut nampak bahwa peningkatan total konsumsi “riil” rumahtangga lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang berada pada kisaran 0,5 persen. Hal ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan pada tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 8, menunjukkan peningkatan setiap tahun-nya untuk masing-

masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peningkatan harga relatif tinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 9,99 persen, pada harga kelompok makanan, minuman dan rokok. Hal ini diakibatkan oleh tingginya harga bahan makanan pada periode tersebut.

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

Komponen Pengeluaran	(%)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	9,99	7,05	6,47	7,30	3,42
b. Pakaian dan Alas Kaki	1,40	1,18	6,79	2,23	2,74
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,44	2,07	7,09	1,89	5,74
d. Kesehatan dan Pendidikan	5,48	2,93	3,37	2,03	2,64
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,75	2,66	2,66	1,36	2,84
f. Hotel dan Restoran	2,86	5,60	1,66	0,92	2,12
g. Lainnya	1,73	2,88	7,64	2,36	3,18

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan kecuali pada tahun 2015 yang mengalami penurunan. Pada tahun 2013 konsumsi LNPRT sebesar 123,78 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 140,43 miliar rupiah (2014), 134,64 miliar

rupiah (2015), 140,90 miliar rupiah (2016), dan 153,26 miliar rupiah (2017). Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 juga berturut-turut adalah 19,65 persen (2013), 5,75 persen (2014), -6,16 persen (2015), 4,09 persen (2016) dan 4,13 persen (2017). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 karena adanya persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden di tahun 2014. Sementara itu pada tahun 2015 pertumbuhannya menjadi -6,16 persen karena nilai konsumsi LNPRT pada tahun tersebut tidak sebesar tahun sebelumnya.

Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	123,78	140,43	134,64	140,90	153,26
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	110,08	116,41	109,24	113,71	118,40
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,71	0,73	0,63	0,61	0,60
Pertumbuhan (<i>ADHK 2010</i>)	19,65	5,75	-6,16	4,09	4,13

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai

barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.765,58	1.870,15	2.232,63	2.473,72	2.590,44
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1.369,87	1.399,56	1.530,50	1.652,12	1.689,44
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	10,06	9,74	10,49	10,66	10,19
Konsumsi Pemerintah per kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	1.508,39	1.589,84	1.888,68	2.082,25	2.170,05
b. ADHK 2010	1.170,32	1.189,79	1.294,72	1.390,67	1.415,27
Pertumbuhan (%)					
a. Total konsumsi pemerintah	-2,24	2,17	9,36	7,95	2,26
b. Konsumsi perkapita	-2,73	1,66	8,82	7,41	1,77
Jumlah Penduduk (000 orang)	1.171	1.176	1.182	1.188	1.194

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2013 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas

dasar harga berlaku adalah sebesar 1.765,58 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 1.870,15 miliar rupiah (2014), 2.232,63 miliar rupiah (2015), 2.473,72 miliar rupiah (2016), dan 2.590,44 miliar rupiah (2017). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami fluktuasi. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 9,74 persen; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2016 sebesar 10,66 persen.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2013 konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga berlaku sebesar 1.508 ribu rupiah, terus meningkat pada tahun-tahun setelah itu, yaitu menjadi 1.590 ribu rupiah (2014); 1.889 ribu rupiah (2015); 2.082 ribu rupiah (2016) dan mencapai 2.170 ribu rupiah pada tahun 2017.

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya (lihat table 11). Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Hal tersebut juga dapat dilihat dari

laju pertumbuhannya yaitu -2,73 persen pada tahun 2013 kemudian menjadi 1,66 persen (2014); 8,82 persen (2015); 7,41 persen (2016) dan 1,77 persen (2017).

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” ini menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 dan 2016, dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah sebesar 9,36 persen dan 7,95 persen; untuk konsumsi per-kapita 8,82 persen dan 7,41 persen.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁸. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2013-2017 meningkat dari 5,31 persen (2013) menjadi 9,89 persen (2014); 5,98 persen (2015); 5,42 persen (2016); dan 12,50 persen (2017). Pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2017, hal ini disebabkan

⁸ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

oleh pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan pembangunan pabrik-pabrik baru di Kabupaten Majalengka.

Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Majalengka 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	5.757,96	6.820,20	7.656,20	8.241,45	9.508,09
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	5.080,25	5.582,84	5.916,88	6.237,37	7.017,20
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	32,82	35,53	35,96	36,45	38,40
Struktur PMTB ⁹					
a. Bangunan (Miliar Rp)	5.077,45	5.850,94	6.596,71	7.063,68	8.149,29
(%)	88,18	85,79	86,16	85,71	85,71
b. Non Bangunan (Miliar Rp)	680,51	969,26	1.059,49	1.177,76	1.358,80
(%)	11,82	14,21	13,84	14,29	14,29
Total PMTB (Miliar Rp)	5.757,96	6.820,20	7.656,20	8.241,45	9.508,09
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan (%)					
a. Bangunan	6,03	6,59	6,83	5,67	12,49
b. Non Bangunan	0,31	34,11	1,04	3,87	12,57
Total PMTB	5,31	9,89	5,98	5,42	12,50

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

⁹ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	841,52	927,96	822,35	891,01	946,11
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	747,99	767,06	602,60	609,41	592,33
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	4,80	4,83	3,86	3,84	3,72

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada pada komponen pengeluaran lainnya.

Pada tahun 2013 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 842 miliar Rupiah, dan meningkat pada tahun 2014 menjadi 928 miliar Rupiah kemudian turun menjadi 822 miliar rupiah pada tahun 2015 dan

meningkat kembali menjadi sebesar 891 miliar rupiah pada tahun 2016 dan sebesar 946 miliar Rupiah pada tahun 2017.

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Majalengka cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013, proporsi perubahan inventori adalah 4,80 persen, selanjutnya 4,83 persen (2014), 3,86 persen (2015), 3,84 persen (2016) dan 3,72 persen (2017). Proporsi perubahan inventori tertinggi terdapat pada tahun 2014.

3.2.6. Net Ekspor Barang dan Jasa

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar wilayah menjadikan komponen ini (dalam series PDRB adh Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut Pengeluaran. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda "**positif**" berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Selama tahun 2013-2017 nilai nominal net ekspor Kabupaten Majalengka selalu bernilai negatif, yang artinya neraca antar daerah di Kabupaten Majalengka mengalami defisit, nilai ekspor Kabupaten Majalengka lebih rendah dari impor antar daerahnya. Pada tahun 2013 nilai net ekspor sebesar negatif 4.707 miliar rupiah, dan bergerak tambah tinggi di tahun-tahun berikutnya yaitu negatif 5.545 miliar rupiah (2014), negatif 6.028 miliar rupiah (2015), negatif 6.650 miliar rupiah (2016) dan negatif 7.240 miliar rupiah (2017). Sementara ditinjau dari proporsi komponen net ekspor antar daerah terhadap total PDRB Kabupaten Majalengka, berkisar diantara 26,83 persen hingga 28,89 persen, dengan proporsi tertinggi dialami pada tahun 2014 sebesar 28,89 persen dan terendah sebesar 26,83 persen di tahun 2013.

Tabel 14. Perkembangan Net Ekspor Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Net Ekspor (Ekspor-Impor)					
a. ADHB (Miliar Rp)	-4.706,56	-5.545,21	-6.027,65	-6.650,37	-7.239,72
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	-4.037,96	-4.312,92	-4.291,14	-4.412,02	-4.538,80
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	-26,83	-28,89	-28,31	-28,66	-28,48

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Majalengka, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2013 - 2017

<https://majalengkakab.bps.go.id>

Agregat dari PDRB merupakan nilai gabungan yang mengukur aspek tertentu dari keseluruhan aktivitas ekonomi. Agregat tersebut merupakan besaran pokok dan indikator ringkas untuk tujuan analisis ekonomi makro, perbandingan antar waktu maupun antar wilayah.

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Majalengka, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

PDRB per-kapita Kabupaten Majalengka menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (tabel 15), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Indonesia rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per-kapita secara “riil” juga selalu meningkat di kisaran 4 sampai 6 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata

pada kisaran 0,5 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per-kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

Tabel 15. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (<i>Miliar Rp</i>)					
a. ADHB	17.543,19	19.193,46	21.292,62	23.206,83	25.419,28
b. ADHK 2010	15.012,89	15.750,66	16.590,93	17.591,79	18.789,49
PDRB perkapita (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	14.988	16.317	18.012	19.534	21.294
b. ADHK 2010	12.826	13.390	14.035	14.808	15.740
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2000	4,40	4,82	5,51	6,30	4,40
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	1.171	1.176	1.182	1.188	1.194
Pertumbuhan	0,50	0,49	0,50	0,48	0,50

4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Pada tahun 2013-2017 sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 80 persen). Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB justru semakin mengalami

penurunan. Peningkatan nilai konsumsi akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup manusia yang tercermin dari meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penurunan proporsi konsumsi akhir mengindikasikan penggunaan produk Kabupaten Majalengka yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (berupa PMTB atau Ekspor) memiliki peran yang semakin besar, meskipun masih dalam skala yang relatif kecil.

Tabel 16. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir ADHB (<i>Miliar Rp</i>)					
a. Rumah tangga	13.760,91	14.979,93	16.474,44	18.110,12	19.461,11
b. LNPRT	123,78	140,43	134,64	140,90	153,26
c. Pemerintah	1.765,58	1.870,15	2.232,63	2.473,72	2.590,44
Jumlah	15.650,27	16.990,51	18.841,72	20.724,74	22.204,81
PDRB ADHB (<i>Miliar Rp</i>)					
	17.543,19	19.193,46	21.292,62	23.206,83	25.419,28
Proporsi	89,21	88,52	88,49	89,30	87,35

4.3 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai

keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

**Tabel 17. Incremental Capital Output Ratio
Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	15.012,89	15.750,66	16.590,93	17.591,79	18.789,49
Perubahan $\Delta(\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1})$ (miliar rupiah)	705,47	737,76	840,27	1.000,86	1.197,70
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	5.080,25	5.582,84	5.916,88	6.237,37	7.017,20
ICOR	7,20	7,57	7,04	6,23	5,86

Melihat pergerakan nilai ICOR dari tahun 2013 sampai dengan 2017 terlihat bahwa dari tahun ke tahun produktivitas kapital yang berdampak

pada pertumbuhan ekonomi semakin efisien, terlihat dari semakin menurunnya nilai ICOR yaitu dari sebesar 7,20 pada tahun 2013 menjadi 5,86 pada tahun 2017.

ICOR juga menjadi salah satu indikasi tingkat efisiensi perekonomian suatu wilayah karena semakin kecil ICOR berarti suatu investasi mampu menghasilkan *output* yang semakin besar.

Nilai investasi yang direfleksikan dari nilai PMTB, kontribusi investasi di dalam struktur PDRB Kabupaten Majalengka pada tahun 2017 sebesar 9.508,09 miliar Rupiah, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing. Jumlah investasi itu menyumbang pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 37,41 persen. Adapun pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tercatat sebesar 6,81 persen.

<https://majalengkakab.bps.go.id>

BAB V
PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2013 s.d 2017 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Majalengka pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2013 s.d 2017, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan

indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia.

<https://majalengkakab.bps.go.id>

<https://majalengkakab.bps.go.id>

LAMPIRAN

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Majalengka Menurut Pengeluaran, 2013-2017

(Juta Rupiah)

KOMPONEN PENGELUARAN	2013	2014	2015 ^R	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	13.760.912	14.979.928	16.474.444	18.110.120	19.461.109
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	6.443.095	7.225.721	8.013.395	9.066.405	9.788.556
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	709.914	741.533	825.847	893.937	954.996
1.c. Perumahan, Perkakas, perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1.451.947	1.521.837	1.751.730	1.866.924	2.015.146
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	970.774	1.052.141	1.119.703	1.192.089	1.273.200
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	2.852.728	3.013.135	3.201.671	3.435.602	3.664.694
1.f. Hotel dan Restoran	571.861	604.910	631.518	686.040	732.785
1.g. Lainnya	760.593	820.653	930.579	969.124	1.031.733
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	123.784	140.434	134.643	140.904	153.256
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.765.576	1.870.148	2.232.629	2.473.718	2.590.442
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.757.960	6.820.196	7.656.200	8.241.446	9.508.089
4.a. Bangunan	5.077.450	5.850.935	6.596.711	7.063.682	8.149.287
4.b. Non Bangunan	680.510	969.261	1.059.489	1.177.764	1.358.802
5. Perubahan Inventori	841.518	927.961	822.349	891.014	946.109
6. Net Ekspor (Ekspor-Impor)	-4.706.562	-5.545.209	-6.027.646	-6.650.372	-7.239.719
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	17.543.189	19.193.459	21.292.618	23.206.830	25.419.285

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Majalengka Menurut Pengeluaran, 2013-2017**

(Juta Rupiah)

KOMPONEN PENGELUARAN	2013	2014	2015 ^R	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	11.742.657	12.197.699	12.722.844	13.391.208	13.910.917
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5.158.842	5.404.252	5.629.147	5.935.552	6.196.142
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	663.220	684.663	714.058	756.043	786.168
1.c. Perumahan, Perkakas, perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1.292.004	1.326.666	1.425.922	1.491.437	1.522.413
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	856.891	902.268	928.904	969.288	1.008.598
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	2.533.801	2.606.929	2.698.163	2.856.426	2.962.692
1.f. Hotel dan Restoran	538.869	539.806	554.329	596.696	624.134
1.g. Lainnya	699.030	733.115	772.322	785.766	810.771
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	110.085	116.410	109.244	113.708	118.399
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.369.871	1.399.562	1.530.502	1.652.120	1.689.445
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.080.250	5.582.843	5.916.881	6.237.372	7.017.199
4.a. Bangunan	4.470.438	4.765.020	5.090.577	5.379.090	6.050.993
4.b. Non Bangunan	609.813	817.823	826.305	858.282	966.206
5. Perubahan Inventori	747.991	767.058	602.598	609.406	592.328
6. Net Ekspor (Ekspor-Impor)	-4.037.960	-4.312.916	-4.291.140	-4.412.021	-4.538.800
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	15.012.894	15.750.655	16.590.928	17.591.793	18.789.488

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Majalengka Menurut Pengeluaran, 2013-2017

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2013	2014	2015 ^R	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	78,44	78,05	77,37	78,04	76,58
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	36,73	37,65	37,63	39,07	38,51
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	4,05	3,86	3,88	3,85	3,76
1.c. Perumahan, Perkakas, perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,28	7,93	8,23	8,04	7,93
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	5,53	5,48	5,26	5,14	5,01
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	16,26	15,70	15,04	14,80	14,42
1.f. Hotel dan Restoran	3,26	3,15	2,97	2,96	2,90
1.g. Lainnya	4,34	4,28	4,37	4,18	4,06
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,71	0,73	0,63	0,61	0,60
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,06	9,74	10,49	10,66	10,19
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,82	35,53	35,96	35,51	37,41
4.a. Bangunan	28,94	30,48	30,98	30,44	32,06
4.b. Non Bangunan	3,88	5,05	4,98	5,08	5,35
5. Perubahan Inventori	4,80	4,83	3,86	3,84	3,72
6. Net Ekspor (Ekspor-Impor)	-26,83	-28,89	-28,31	-28,66	-28,48
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Majalengka Menurut Pengeluaran, 2013-2017

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2013	2014	2015 ^R	2016 [*]	2017 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	78,22	77,44	76,69	76,12	74,04
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	34,36	34,31	33,93	33,74	32,98
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	4,42	4,35	4,30	4,30	4,18
1.c. Perumahan, Perkakas, perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,61	8,42	8,59	8,48	8,10
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	5,71	5,73	5,60	5,51	5,37
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	16,88	16,55	16,26	16,24	15,77
1.f. Hotel dan Restoran	3,59	3,43	3,34	3,39	3,32
1.g. Lainnya	4,66	4,65	4,66	4,47	4,32
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,66	4,65	4,66	4,47	4,32
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,12	8,89	9,22	9,39	8,99
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	33,84	35,45	35,66	35,46	37,35
4.a. Bangunan	29,78	30,25	30,68	30,58	32,20
4.b. Non Bangunan	4,06	5,19	4,98	4,88	5,14
5. Perubahan Inventori	4,98	4,87	3,63	3,46	3,15
6. Net Ekspor (Ekspor-Impor)	-26,90	-27,38	-25,86	-25,08	-24,16
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

^R Angka Perbaikan

^{*} Angka Sementara

^{**} Angka Sangat Sementara

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Majalengka Menurut Pengeluaran, 2013-2017

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2013	2014	2015 ^R	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	9,39	8,86	9,98	9,93	7,46
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	11,44	12,15	10,90	13,14	7,97
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	7,83	4,45	11,37	8,24	6,83
1.c. Perumahan, Perkakas, perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,99	4,81	15,11	6,58	7,94
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	10,92	8,38	6,42	6,46	6,80
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	6,92	5,62	6,26	7,31	6,67
1.f. Hotel dan Restoran	7,46	5,78	4,40	8,63	6,81
1.g. Lainnya	2,32	7,90	13,40	4,14	6,46
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	27,77	13,45	-4,12	4,65	8,77
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,63	5,92	19,38	10,80	4,72
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,07	18,45	12,26	7,64	15,37
4.a. Bangunan	11,34	15,23	12,75	7,08	15,37
4.b. Non Bangunan	1,41	42,43	9,31	11,16	15,37
5. Perubahan Inventor i ¹⁾					
6. Net Ekspor (Ekspor-Impor) ¹⁾					
PDRB	11,80	9,41	10,94	8,99	9,53

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

¹⁾ Laju Pertumbuhan tidak ditampilkan

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Majalengka Menurut Pengeluaran, 2013-2017

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2013	2014	2015 ^R	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	2,55	3,88	4,31	5,25	3,88
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1,32	4,76	4,16	5,44	4,39
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	6,34	3,23	4,29	5,88	3,98
1.c. Perumahan, Perkakas, perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,34	2,68	7,48	4,59	2,08
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	5,15	5,30	2,95	4,35	4,06
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	3,05	2,89	3,50	5,87	3,72
1.f. Hotel dan Restoran	4,48	0,17	2,69	7,64	4,60
1.g. Lainnya	0,58	4,88	5,35	1,74	3,18
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	19,65	5,75	-6,16	4,09	4,13
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-2,24	2,17	9,36	7,95	2,26
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,31	9,89	5,98	5,42	12,50
4.a. Bangunan	6,03	6,59	6,83	5,67	12,49
4.b. Non Bangunan	0,31	34,11	1,04	3,87	12,57
5. Perubahan Inventori ¹⁾					
6. Net Ekspor (Ekspor-Impor) ¹⁾					
PDRB	4,93	4,91	5,33	6,03	6,81

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

¹⁾ Laju Pertumbuhan tidak ditampilkan

Tabel 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Majalengka Menurut Pengeluaran, 2013-2017

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2013	2014	2015 ^R	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	128,76	140,16	154,15	169,45	182,09
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	133,83	150,09	166,45	188,32	203,32
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	128,62	134,35	149,62	161,96	173,02
1.c. Perumahan, Perkakas, erlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	121,59	127,44	146,69	156,34	168,75
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	129,07	139,88	148,87	158,49	169,27
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	125,14	132,18	140,45	150,71	160,76
1.f. Hotel dan Restoran	119,51	126,41	131,97	143,37	153,14
1.g. Lainnya	123,30	133,03	150,85	157,10	167,25
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	143,29	162,56	155,86	163,10	177,40
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	133,27	141,16	168,52	186,72	195,53
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	160,70	190,34	213,67	230,01	265,36
4.a. Bangunan	166,20	191,52	215,94	231,22	266,76
4.b. Non Bangunan	128,84	183,50	200,58	222,98	257,25
5. Perubahan Inventori ¹⁾					
6. Net Ekspor (Ekspor-Impor) ¹⁾					
PDRB	136,17	148,98	165,27	180,13	197,31

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

¹⁾ Indeks Perkembangan tidak ditampilkan

Tabel 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Majalengka Menurut Pengeluaran, 2013-2017

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2013	2014	2015 ^R	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	109,87	114,13	119,04	125,30	130,16
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	107,16	112,25	116,93	123,29	128,70
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	120,16	124,05	129,37	136,98	142,44
1.c. Perumahan, Perkakas, erlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	108,19	111,09	119,41	124,89	127,49
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	113,93	119,96	123,50	128,87	134,10
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	111,15	114,36	118,36	125,30	129,96
1.f. Hotel dan Restoran	112,61	112,81	115,84	124,70	130,43
1.g. Lainnya	113,32	118,84	125,20	127,38	131,43
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	113,32	118,84	125,20	127,38	131,43
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	103,40	105,64	115,53	124,71	127,52
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	141,78	155,81	165,13	174,08	195,84
4.a. Bangunan	146,33	155,98	166,63	176,08	198,07
4.b. Non Bangunan	115,45	154,83	156,44	162,49	182,92
5. Perubahan Inventori ¹⁾					
6. Net Ekspor (Ekspor-Impor) ¹⁾					
PDRB	116,53	122,26	128,78	136,55	145,85

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

¹⁾ Indeks Perkembangan tidak ditampilkan

**Tabel 9. Indeks Perkembangan Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Kabupaten Majalengka Menurut Pengeluaran, 2013-2017**

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2013	2014	2015 ^R	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	117,19	122,81	129,49	135,24	139,90
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	124,89	133,70	142,36	152,75	157,98
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	107,04	108,31	115,66	118,24	121,47
1.c. Perumahan, Perkakas, erlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	112,38	114,71	122,85	125,18	132,37
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	113,29	116,61	120,54	122,99	126,23
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	112,59	115,58	118,66	120,28	123,69
1.f. Hotel dan Restoran	106,12	112,06	113,92	114,97	117,41
1.g. Lainnya	108,81	111,94	120,49	123,33	127,25
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	112,44	120,64	123,25	123,92	129,44
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	128,89	133,62	145,88	149,73	153,33
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	113,34	122,16	129,40	132,13	135,50
4.a. Bangunan	113,58	122,79	129,59	131,32	134,68
4.b. Non Bangunan	111,59	118,52	128,22	137,22	140,63
5. Perubahan Inventori ¹⁾					
6. Net Ekspor (Ekspor-Impor) ¹⁾					
PDRB	116,85	121,86	128,34	131,92	135,28

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

¹⁾ Indeks Perkembangan tidak ditampilkan

**Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Kabupaten Majalengka Menurut Pengeluaran, 2013-2017**

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2013	2014	2015 ^R	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	6,67	4,80	5,44	4,44	3,45
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	9,99	7,05	6,47	7,30	3,42
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1,40	1,18	6,79	2,23	2,74
1.c. Perumahan, Perkakas, erlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,44	2,07	7,09	1,89	5,74
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	5,48	2,93	3,37	2,03	2,64
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	3,75	2,66	2,66	1,36	2,84
1.f. Hotel dan Restoran	2,86	5,60	1,66	0,92	2,12
1.g. Lainnya	1,73	2,88	7,64	2,36	3,18
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,79	7,29	2,17	0,54	4,46
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,10	3,68	9,17	2,64	2,41
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,52	7,78	5,92	2,11	2,55
4.a. Bangunan	5,01	8,11	5,54	1,34	2,56
4.b. Non Bangunan	1,10	6,20	8,19	7,02	2,48
5. Perubahan Inventori ¹⁾					
6. Net Ekspor (Ekspor-Impor) ¹⁾					
PDRB	6,55	4,28	5,32	2,79	2,55

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

¹⁾ Laju Pertumbuhan Indeks tidak ditampilkan

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



*BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAJALENGKA*

Jalan Gerakan Koperasi No. 39 Majalengka 45411

e-mail: bps3210@bps.go.id, Homepage: <http://majalengkakab.bps.go.id>